

POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA, STRATEGI PEMENANGAN PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI MALUKU UTARA 2013

Aswir F. Badjodah dan Saiful Ahmad

Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Indonesia

Email: aswirfbadjodah@yahoo.co.id, dan saifulahmad1112@gmail.com

INFO ARTIKEL

Diterima
21 Februari 2021
Direvisi
2 Maret 2021
Disetujui
15 April 2021

Keywords: elections; identity politics; strategy

ABSTRACT

This study describes Identity Politics in Indonesia which was used as a strategy to win the Regional Head Election (PILKADA) in North Maluku Province in 2013. The main issues discussed are: The strategy of Abdul Gani Kasuba (AGK) and Muhammad Natsir Thaib (Manthab) to make Identity Politics as a means of winning the 2013 North Maluku Regional Election. The research was conducted in Ternate City, with qualitative approach with a combination of case study research. Data retrieval with in-depth interviews and searches of written documents. The results of this study showed that the factors of ketokohan, ethnicity, strong network (with ustad branding), symbols and imaging are the determining factors of victory. In addition, the consolidation of the network of figures, building opinions, and marketing (direct selling) politics contributed to the maximum victory of the AGK Pair - Manthab.

ABSTRAK

Studi ini menjelaskan Politik Identitas di Indonesia yang digunakan sebagai strategi untuk memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2013. Pokok masalah yang dibahas, yaitu: Strategi pasangan Abdul Gani Kasuba (AGK) dan Muhammad Natsir Thaib (Manthab) menjadikan Politik Identitas sebagai sarana meraih kemenangannya di Pilkada Maluku Utara 2013. Penelitian dilakukan di Kota Ternate, dengan pendekatan kualitatif dengan kombinasi studi kasus (*case study research*). Pengambilan data dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan penelusuran terhadap dokumen tertulis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor ketokohan, etnis, jaringan yang kuat (dengan branding ustad), simbol dan pencitraan adalah faktor penentu kemenangan. Disamping itu konsolidasi jaringan tokoh, membangun opini, dan marketing (*direct selling*) politik turut memberikan andil kemenangan maksimal Pasangan AGK - Manthab.

Kata Kunci: pilkada; politik identitas; strategi

Pendahuluan

Pemenangan pasangan KH. Abdul Gani Kasuba, Lc dan Ir. Muhammad Natsir Thaib (AGK-Manthab) dalam pemilihan

Kepala (daerah selanjutnya disebut Pilkada) Provinsi Maluku Utara 2013 tidak terlepas dengan identitas yang melekat pada dirinya yang dikenal sebagai seorang ustad dan

berasal dari etnis Tobelo Galela yang memiliki populasi terbesar. Etnis ini tersebar di beberapa daerah di Maluku Utara (Malut) antara lain Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Pulau Morotai, dan Halmahera Utara. Pengaruh etnis dalam Pilkada sangat kuat sehingga pasangan calon yang akan bertarung akan selalu menggunakan isu etnis sebagai pemasaran politik.

Pemasaran politik merupakan hal yang sangat penting dilakukan dalam suatu pemilihan karena dapat membantu efektifitas penyusunan produk politik, serta dapat menyampaikan produk politik tersebut secara luas kepada masyarakat (Nurfitriani et al., 2017).

Pasca Orde Baru, kajian politik identitas di Indonesia mendapat perhatian yang khusus. Pada masa ini, nuansa kajian politik identitas di Indonesia, lebih pada masalah etnisitas, agama, ideologi, dan kepentingan-kepentingan lokal. Kepentingan ini pada umumnya diwakili oleh para elit dengan artikulasinya masing-masing. Gerakan pemekaran daerah, bahkan dapat dipandang sebagai salah satu wujud dari politik identitas. Isu-isu tentang keadilan dan pembangunan daerah menjadi sentral dalam wacana politik mereka, tetapi apakah semuanya sejati atau lebih banyak dipengaruhi oleh ambisi para elit lokal untuk tampil sebagai pemimpin, merupakan masalah yang tidak selalu mudah dijelaskan (Maarif et al., 2010).

Politik identitas etnis dihembuskan sebagai isu putra daerah yang kebanyakan dilakukan elit lokal untuk merebut dan melanggengkan kekuasaan politiknya. Tentang hal ini, Eindhoven (Sjaf, 2014) dengan tegas menyatakan bahwa momentum reformasi telah menghantarkan elit lokal mengkonsolidasikan kekuatan identitas (etnis) untuk menolak kepala daerah yang berasal dari non-etnisnya. Hal ini tampak dengan jelas dalam fenomena pembentukan Kabupaten baru, disini para elit etnis

berupaya memisahkan diri dari Kabupaten induknya dengan alasan distingsi sejarah kebudayaan, agama, dan etnisnya (Salim, 2016).

Dalam ranah politik inilah para elit lokal memanfaatkan politik identitas sebagai sebuah pendekatan yang dapat menjebatani kepentingan dirinya dengan pemilih. Hal ini terjadi dalam setiap pemilihan kepala daerah. Para elit lokal yang bersaing dalam pilkada tentunya harus memiliki basis pendukung etnis dan agama yang kuat. Karena kecenderungan masyarakat pemilih akan memilih figur kepala daerah yang masih ada hubungan identitas dengan dirinya.

Penggunaan politik identitas oleh pasangan calon menjadi simbol dan penanda bahwa dalam masyarakat membutuhkan pendekatan yang dapat mempengaruhi pikiran pemilih agar memberikan dukungan saat hari pencoblosan. Pendekatan tersebut adalah memperkenalkan diri kepada masyarakat dengan berbagai bentuk sarana, lewat baliho dan spanduk yang berisikan ajakan dan himbauan untuk memilih pemimpin yang memperjuangkan budaya lokal, beriman dan bertakwa, jujur dan amanah. Semua ini juga tergambar dalam visi dan misi saat pertemuan dan kunjungan keberbagai daerah yang menjadi target perolehan suara.

Partisipasi politik secara harfiah dan penentuan kebijaksanaan pemerintah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik an, dengan kata lain setiap warga negara hal ini mengacu pada keikutsertaan tanpa membedakan jenis kelamin baik laki warganegara dalam berbagai proses politik laki maupun perempuan semestinya terlibat Reichert (2010) partisipasi politik merupakan dalam proses pembangunan terutama di kegiatan warga yang berusaha mem- bidang politik. Dengan demikian, keinginan pengaruhi peraturan dan keputusan di dan harapan setiap warga negara dapat berbagai level politik (Wahyudi et al., 2013).

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sejatinya merupakan bagian penting kehidupan bernegara Indonesia di era Reformasi. Penyelenggaraan Pemilu termasuk Pilkada merupakan wujud pelaksanaan sistem demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*) (Sutrisno, 2017).

Pilkada sebagai bentuk demokrasi lokal akan berhasil apabila para pemangku kepentingan dapat menyadari betapa pentingnya makna demokrasi ini. Sebagaimana makna demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh sebab itu, Pilkada menjadi penting karena kedaulatan rakyat menjadi penentu dalam melahirkan seorang pemimpin. Menurut Brian C. Smith, demokratisasi di daerah merupakan prasyarat bagi muncul dan berkembangnya demokrasi di tingkat lokal. Ketika pelaksanaan demokratisasi pada tingkat lokal secara kualitas berkembang, otomatis berpengaruh juga pada kualitas pelaksanaan demokrasi pada tingkat nasional (Marijan, 2007).

Salah satu bentuk demokratisasi di daerah adalah pelaksanaan Pilkada secara langsung. Pilkada langsung ini dapat dijadikan momen bagi masyarakat lapisan bawah untuk membangun kondisi politik daerah yang lebih baik. Dengan Pilkada langsung, masyarakat dapat menggunakan hak politiknya sesuai dengan aspirasi mereka sendiri. Pilkada saat ini telah menjadi panggung politik daerah yang begitu meriah. Pasalnya gegap gempita Pilkada hampir menyeret semua potensi lapisan masyarakat untuk ikut serta bereuforia. Sehingga dimanapun, selalu menarik untuk dipantau. Selain itu, Pilkada menawarkan posisi baru bagi para pemilik sumber-sumber kekuasaan, baik yang berlingkup tradisional seperti ustad, pendeta, kepala suku/ etnis, maupun kandidat yang berlingkup pengusaha dan birokrat.

Dalam proses pemilihan kepala daerah atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur para pasangan calon akan merebut suara

pemilih (*voters*), sehingga Partai Politik atau kandidat akan melakukan berbagai macam kegiatan, salah satunya aktivitas kampanye politik. (Arifin, 2003) mendefinisikan kampanye politik sebagai bentuk komunikasi politik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat (Yustian, 2008). Bentuk dari aktivitas kampanye politik biasanya dalam bentuk konvoi massa, pertemuan, penyebaran selebaran dan pemasangan pada media cetak (baliho, spanduk, surat kabar), iklan pada media massa dan sebagainya.

Propinsi Maluku Utara sampai pada momentum Pilkada tahun 2013 memiliki jumlah penduduk sebesar 1.035.550 jiwa dan daftar pemilih tetap (DPT) berjumlah 813.117 jiwa pilih yang tersebar di 9 Kabupaten/Kota. Wilayah ini dihuni oleh beberapa etnis dominan di antaranya etnis Makean, Tobelo dan Galela (Togale), Ternate, Tidore dan etnis kecil yaitu etnis Cina, Buton, dan Halmahera. Setiap etnis memiliki tokoh berpengaruh untuk dicalonkan dalam setiap pemilihan kepala daerah. Faktor-faktor tersebut membuat pertarungan politik pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara 2013 semakin ketat. Karena pertarungan ini lebih pada persaingan figur dan/atau pertarungan antar etnis dan agama. Sehingga partai politik akan berusaha mencalonkan pasangan yang memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi. Tentunya berbagai pertimbangan yang akan dilihat, diantaranya ketokohan, etnis, dan agama. Sering partai menggunakan model pasangan calon yang dikonfigurasi, misalnya konfigurasi pasangan etnis Makean dan etnis Tidore, etnis Tobelo dengan etnis Makean, etnis Buton dengan Tidore, etnis Galela dan Tionghoa serta konfigurasi Islam dan Kristen atau sebaliknya. Tujuannya agar pasangan calon dapat mencerminkan keterwakilan

etnis, agama dan wilayahnya. Etnis yang dominan dan berpengaruh di Maluku Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini (La Suhu, 2019):

Tabel 1
Jumlah Etnis yang ada di Provinsi Maluku Utara

No	Etnis	Persentase (%)
1	Tobelo	10,78
2	Galela	9,70
3	Ternate	9,40
4	Makean	8,51
5	Tidore	7,76
6	Sula	6,98
7	Buton	5,67
8	Jawa	4,12
9	Sangir	3,04
10	Loloda	2,61
11	Tobaru	2,24
12	Kao	2,15
13	Bugis	2,01
14	Patani	1,84
15	Bajo	1,72
16	Lainnya	21,46

Sumber: Sejarah Negara.com dan diolah oleh Penulis

Etnis-etnis tersebut di atas menyebar di seluruh wilayah Maluku Utara, antara lain etnis Tobelo dan Galela (Togale) dominan di Kabupaten Halmahera Utara dan Pulau Morotai, serta berada di Halmahera Selatan, Pulau Bacan, Kasiruta, Pulau Obi, Halmahera Timur, dan Halmahera Tengah. Sementara etnis Makean dominan di pulau Makean, dan tersebar di Pulau Ternate, Wilayah Oba, Sofifi, Malifut Halmahera Utara, Pulau Bacan, dan beberapa desa di Halmahera Barat. Etnis Tidore berada di pulau Tidore, pulau Maitara, Pulau Mare, tersebar di wilayah Oba, Sofifi, Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Etnis Buton dominan di Pulau Taliabu, Pulau Obi dan tersebar di wilayah Halmahera Tengah, Halmahera Timur, dan Pulau Bacan dan pulau Mangoli (Pelita, Dofa, Buya). Etnis Ternate dominan di Kota Ternate, dan tersebar di Jailolo, Ibu, serta Kao. Etnis Sula dominan di Pulau Sanana dan tersebar di

wilayah Mangoli dan Pulau Taliabu. Sedangkan etnis Jawa, Sangier, Tobaru, Bugis, Patani, Loloda, Kao, dan Bajo adalah minoritas di Maluku Utara.

Kondisi masyarakat Maluku Utara yang terdiri dari multi etnis, mereka menganut agama yang berbeda-beda. Data terkini menggambarkan komposisi agama-agama yakni agama (Islam 76,1%, Protestan 23,1%, Katolik 0,52%, lainnya 0,30%) maka konfigurasi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur perlu di pertimbangkan oleh setiap partai politik dan calon perseorangan. Merancang strategi kampanye perlu memperhatikan segmentasi pemilih berdasarkan identitas yang ada dalam masyarakat. Berikut komposisi penduduk Maluku Utara per Kabupaten/Kota berdasarkan agama pada tabel di bawah ini (Salim, 2016):

Tabel 2
Jumlah Penduduk menurut Agama di Provinsi Maluku Utara, Tahun 2013

No	Kabupaten/ Kota	Agama						Lain nya	Jumlah
		Islam	Cristen	Katolik	Hindu	Budha	Khong Hu Cu		
1	Halmahera Barat	40.902	58.525	876	26	7	14	39	100.428
2	Halmahera Tengah	34.359	7.907	141	3	0	0	11	42.815
3	Kepulauan Sula	120.358	9.903	1.791	61	3	1	32	132.524
4	Halmahera Selatan	170.641	27.559	246	14	8	4	18	198.911
5	Halmahera Utara	63.927	96.030	1.386	22	15	8	13	161.847
6	Halmahera Timur	46.583	26.036	310	22	11	4	0	73.109
7	Pulau Morotai	30.803	21.715	57	5	2	2	1	52.697
8	Kota Ternate	78.678	5.744	452	45	41	161	5	185.705
9	Kota Tikep	84.839	5.052	119	2	3	18	3	90.055
Total		771.110	258.471	5.378	200	90	179	122	1.035.550
Prosentase		76,1%	23,1%	0,52%				0,30%	

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Maluku Utara adalah beragama Islam yang tersebar 9 Kabupaten dan Kota. Penduduk Islam terbanyak berada di Kota Ternate, Halmahera Selatan, dan Kepulauan Sula. Sedangkan penduduk Kristen Protestan terbanyak berada di Halmahera Utara dan Halmahera Barat. Dengan mempertimbangkan persentase penduduk

berdasarkan agama seperti ini akan sangat penting bagi pasangan calon untuk mempersiapkan strategi dalam menarik simpati pemilih berdasarkan identitas yang melekat pada dirinya.

Maluku Utara sebagai daerah kepulauan yang daerah Kabupaten/Kota harus ditempuh dengan menggunakan kapal laut, *speed boat*, helikopter. Maka pasangan calon yang bertarung akan menghadapi operasional pendanaan pilkada yang besar. Modal yang besar tersebut bukan hanya digunakan dalam kampanye, melainkan juga dalam membangun komunikasi dengan para konstituen dan juga penyediaan alat peraga kampanye serta iklan lewat media elektronik dan media massa. Termasuk juga modal untuk *money politic* (Marijan, 2007) Tentunya, para pasangan calon harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli suara pemilih dengan harga yang sebenarnya relatif kecil jika dilihat dari sisi nilainya, namun jika dilihat dari sisi jumlah suara yang harus dibeli dengan uang, maka jumlahnya cukup besar. Karena tidak semua calon pemimpin daerah yang berkompetisi memiliki nilai *capital* (dana) yang banyak. Maka dibutuhkan strategi lainnya yang perlu dioperasionalkan sebagai langkah strategis untuk dapat menarik simpati masyarakat.

Metode yang bisa dipakai oleh seorang kandidat adalah mengunjungi konstituen di dapilnya, menghadiri undangan perkawinan, tahlilan, dan keterlibatan dalam kepanitiaan mesjid, gereja, serta bakti sosial. Tujuannya agar seorang kandidat dikenal oleh masyarakat pemilih sehingga memiliki popularitas yang tinggi. Tapi itu juga belum cukup karena menjadi populer saja dalam sebuah pilkada tidaklah menjamin seseorang akan meraih kemenangan. Seorang calon harus memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi. Dengan begitu, seorang calon diharapkan mampu bersaing dan memenangkan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode Analisis Kuantitatif. Dengan Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu dengan deskriptif dan Uji statistik inferensial. Uji Statistik inferensial menggunakan analisis uji korelasional dan uji regresi atau analisis pengaruh.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik survey, dan lokasi penelitian di Kampus Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) di Kota Ternate, dengan unit analisis adalah Mahasiswa/i semester II.

Hasil dan Pembahasan

Memasuki tahapan berikutnya adalah proses pemilihan Gubernur putaran pertama. Proses ini dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2013 dengan menghasilkan perolehan suara dari masing-masing kandidat adalah pasangan calon Namto Hui Robo dan Ismail Arifin meraih suara 66.018 atau (11,49 %), Muhadjir Albaar – Sahrin Hamid 53.620 (9,27 %), Ahmad Hidayat Mus – Hasan Doa 163.684 (28,50 %), Samsir Andily – Beny Laos 79.246 (13,80 %), Abdul Gani Kasuba – Muhammad Nasir Thalib 123.689 (21,54 %), Hein Namotemo – Malik Ibrahim 88.471 (15,40 %) (lihat SK KPU Provinsi Maluku Utara).

Menurut ketentuan bahwa pasangan calon yang berhasil mendapatkan 30 % suara maka akan diputuskan sebagai pemenang. Akan tetapi dalam perhitungan tersebut tidak ada pasangan yang mencapai maka dengan hasil perolehan suara putaran pertama tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara menetapkan dua pasangan calon yang berhak untuk bertarung pada putaran kedua yaitu Ahmad Hidayat Mus – Hasan Doa 163.684 (28,50 %) dan Abdul Gani Kasuba – Muhammad Natsir Thaib 123.689 (21,54 %) yang dilaksanakan

pada tanggal 31 Oktober 2013. Atas putusan tersebut, kedua pasangan dengan megerahkan seluruh kekuatan dan strategi yang dimiliki untuk bertarung pada putaran kedua. Hasil pemilihan putaras kedua dimenangkan oleh pasangan calon Abdul Gani Kasuba – Muhammad Natsir Thalib 262.983 (50,41%) mengalahkan pasangan Ahmad Hidayat Mus – Hasan Doa 258.747 (49,59%) (lihat Berita Acara KPU Provinsi Maluku Utara).

A. Kemenangan AGK-Manthab dan Faktor-faktor pendukung

1. Instrumen Simbol Agama

Agama dalam kehidupan memiliki peran yang sangat penting bagi manusia. Sebab agama merupakan pedoman dan arah manusia untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Agama juga meruapak sistem nilai dan kepercayaan akan sebuah kekuatan yang ada diluar kekuatan manusia. Kekuatan yang ada diluar kekuatan manusia itu adalah kekuatan sang pencipta kehidupan ini, Allah SWT. Agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) terhadap Tuhan Yang Maha kuasa, tata peribadatan, dan tata kaidah yang bertalian dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya dengan kepercayaan itu (Dendy, 2008). Secara etimologis Agama berasal dari bahasa latin *religare* yang berarti mengikat. Oleh karena itu setiap orang yang beragama mempunyai nilai yang dapat digunakan untuk melihat dan menilai sesuatu yang dapat memberikan manfaat baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dan nilai-nilai ini dapat kita lihat pada sikap seseorang dalam aktifitas kesehariannya dan sikap untuk berpartisipasi dalam Pilkada dan Pileg.

Instrumentalisasi agama yang dipraktekkan dalam Pilkada Maluku Utara 2013 hanya dalam bentuk penggunaan simbol keagamaan yang dipasangkan pada pasangan calon (paslon), misalnya tokoh agama dengan sebutan ustad/ pendeta dan konfigurasi pemaketan paslon (Islam-Kresten/ Kresten-Islam). Penggunaan simbol agama bertujuan untuk menyampaikan makna simbolik pada masyarakat pemilih untuk mempertimbangkan pilihannya dalam memilih pemimpin kepala daerah. Praktek penggunaan simbol agama dalam bentuk konfigurasi pemaketan paslon dan tokoh agama dengan sebutan ustad dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3
Instrumen Simbol Agama pada Konfigurasi Paslon

No	Nama Paslon	Simbol Agama	Keterangan
1	Namto Hui Roba dan Ismail Arifin	Kresten Protestan dan Islam	Namto Hui Roba beragama Kresten Protestan dari etnis Tionghoa dan Ismail Arifin beragama Islam dari etnis Tidore
2	Syamsir Andili dan Benny Laos	Islam dan Kresten Katolik	Syamsir Andili beragama Islam dari etnis Makean dan Benny Laos beragama Kresten dari etnis Tionghoa
3	Hein Namoteme dan Malik Ibrahim	Kresten Protestan dan Islam	Hein Namotemo beragama Kresten Protestan dari etnis Tobelo-Galela dan Malik Ibrahim beragama Islam dari etnis Tidore
4	Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib	Islam - Islam	Abdul Gani Kasuba beragama Islam dari etnis Tobelo-Galela dan Muhammad Natsir Thaib Beragama Islam dari etnis Tidore
5	Ahmad Hidayat Mus dan Hasan Doa	Islam - Islam	Ahmad Hidayat Mus beragama Islam dari etnis Buton dan Hasan Doa beragama Islam dari etnis Tidore
6	Muhajir Albar dan Sahrin	Islam - Islam	Muhadjir Albar beragama Islam dari etnis Makean dan

No	Nama Paslon	Simbol Agama	Keterangan
	Hamid		Sahrin Hamid beragama Islam dari etnis Tobelo-Galela

Sumber: Diolah Penulis

Table 4
Instrumen Simbol Agama

No	Nama Paslon	Simbol Agama	Keterangan
1	Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib	Tokoh Agama Islam/ Kyai dan Ustad	Sebelum menjadi politisi (anggota DPR RI dan Wakil Gubernur) Abdul Gani Kasuba sebagai seorang penceramah atau dai dan guru agama di pondok Pasantren Ome Tidore

Sumber: diolah penulis

Gambaran tabel tentang instrumen simbol agama tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa dari 6 paslon yang berkompetisi hanya 3 paslon yang menggunakan simbol agama dengan konfigurasi Islam - Kresten atau Kresten - Islam sedangkan 3 paslon lain lebih pada konfigurasi etnisitas. Sementara penggunaan tokoh agama dengan sebutan ustad dari 6 paslon hanya 1 paslon yang memiliki sebutan sebagai tokoh agama atau Ustad adalah Abdul Gani Kasuba, karena sebelum menjadi seorang politisi Abdul Gani Kasuba dikenal sebagai seorang penceramah/dai, dan 5 paslon yang lain lebih dikenal sebagai politisi dan birokrat.

Penggunaan simbol agama dalam politik menjadi kekuatan utama yang tidak bisa diabaikan. Tentunya, karena mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat yang multi agama sehingga pendekatan simbol agama akan lebih mendapat penerimaan yang luas dari masyarakat pemilih dan keuntungan memanfaatkan simbol agama sebagai sarana pemasaran akan dapat meningkat perolehan suara pasangan calon (paslon).

Menurut John Esposito, kebangkitan global agama tidak hanya bersifat religius, tapi juga kebangunan sosial dan politik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kebangkitan agama saat ini dapat dibaca sebagai pencarian identitas, otentisitas dan komunitas. Disamping itu terdapat kebulatan tekad untuk mewujudkan makna dan tatanan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Kebangunan agama tidak hanya ditandai hiruk pikuk suasana keberagamaan, tapi juga simbol-simbol agama yang mulai menyeruak ke dalam kehidupan publik. Banyak kalangan umat beragama kembali pada tradisi agama, sembari meneguhkan relevansi agama bukan hanya terhadap kehidupan nanti, tapi juga kehidupan saat ini (Mun'im A, 2003).

Masyarakat Maluku Utara yang terdiri dari multi agama, dan mayoritas masyarakat sebagai pemeluk agama Islam berjumlah 771.10 jiwa (76,1%), sebagian besar mendiami Kota Ternate, Halmahera Selatan, dan Kepulauan Sula; kemudian disusul agama Kresten Protestan 258.471(23,1%), agama Kresten Katolik 5.378 jiwa (0,52%), sebagian besar mendiami Halmahera Utara dan Halmahera Barat; Hindu 200, yang sebagian besar di Kepulauan Sula dan Kota Ternate; Budha 90, dan Kong Hu Cu 179, yang sebagian besar di Kota Ternate (lihat tabel 2). Dengan persentase masyarakat seperti ini tentunya menjadi penting bagi tim pemenangan dan paslon untuk menyiapkan strategi dalam meraih simpati pemilih. Oleh sebab itu, simbol agama menjadi perhatian utama tim pemenangan untuk memasarkan paslon pada pemilih.

Sepanjang kontestasi Pilkada di Maluku Utara, simbol agama telah melahirkan pembelahan pilihan pemilih berdasarkan agama. Akibatnya pemilih akan menjadi tidak rasional dalam menentukan pilihannya karena tidak berdasarkan pada visi dan misi serta program kerja paslon namun masih melihat pada kesamaan agama

atau ideologi yang dimiliki paslon. Pada akhirnya paslon yang terpilih tersebut kurang memiliki kapasitas untuk menyelesaikan persoalan kesejahteraan yang belum dinikmati masyarakat selama ini.

Kenyataan ini dapat terlihat pada berbagai daerah yang sampai saat ini belum menikmati penerangan listrik negara, infrastruktur jalan dan jembatan yang layak. Persoalan ini berdampak pada pendapatan masyarakat yang rendah karena hasil komoditi pertanian dan hasil tangkapan ikan tidak dapat di pasarkan di daerah lain ataupun bisa dipasarkan akan tetapi biaya operasional untuk angkutan sangat mahal sehingga tidak dapat menutupi modal yang sudah dikeluarkan.

Padahal, setiap momen pilkada diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang mampu melakukan lompatan-lompatan perubahan yang signifikan sehingga tidak ada lagi masyarakat yang merasa kesulitan untuk meningkatkan pendapatan keluarganya. Hal demikian sangat berkaitan dengan visi, misi dan program kerja yang ditawarkan oleh kandidat gubernur dan wakil gubernur. Oleh sebab itu, berbagai strategi disesuaikan dengan persoalan yang dialami masyarakat dengan mempertimbangkan penggunaan simbol identitas tertentu agar bisa mempengaruhi pilihan pemilih. Salah satu cara yang dianggap efektif untuk menghadapi masyarakat yang multi agama seperti ini adalah penggunaan simbol-simbol agama untuk memenangkan pilkada 2013.

Kondisi seperti ini menjadi perhatian pasangan calon yang bertarung pada pilkada 2013 untuk menjadikan pertimbangan dalam menetapkan pendekatan dan strategi yang akan digunakan dalam merebut simpati masyarakat. Strategi yang sesuai akan menghasilkan kemenangan yang maksimal, misalnya menciptakan visi dan misi serta program kerja, kemudian memunculkan tokoh yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi

masyarakat. Pada pilkada 2013, ada 5 pasangan calon (paslon) yang diusulkan partai politik dan 1 paslon yang di lahirkan masyarakat sendiri (jalur Independen).

Proses pilkada yang berlangsung dalam 2 putaran, akhirnya dimenangkan pasangan Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib (AGK-Manthab). Kemenangan ini disebabkan karena adanya penggunaan simbol identitas agama yang kuat, AGK sebagai tokoh agama yang beragama Islam dan latarbelakang sebagai penceramah atau da'i menjadi magnet untuk meraih suara di kantong-kantong pemeluk yang beragama Islam, diantaranya Kota Ternate dan Halmahera Selatan. Strategi yang digunakan AGK-Manthab untuk daerah yang mayoritas beragama Islam adalah menampilkan simbol identitas agama saat berkampanye. Simbol identitas agama yang tampak berupa penggunaan kopiah disertai sorban dan materi kampanye yang disampaikan model penceramah. Sedangkan untuk daerah yang minoritas beragama Islam, kampanye AGK lebih mengandalkan jaringan ketokohan dan *direct selling*. Misalnya, saat berkampanye di daerah yang minoritas beragama Islam AGK memanfaatkan tokoh lokal yang berpengaruh untuk menyampaikan visi dan misi serta program kerja lima tahun kedepan apabila terpilih. Di samping itu juga, menurunkan tim kampanye untuk melakukan *direct selling* yang bertujuan memantau dinamika politik lokal menjelang pencoblosan nanti.

B. Instrumentalisasi Simbol Etnis

Katakan saya orang Ternate dan anda orang Jawa, maka budaya Ternate dan budaya Jawa akan tertanam dalam diri saya dan anda, dan itu membuat saya dan anda menjadi khas memiliki identitas yang berbeda dengan orang Sunda, Aceh, Betawi, Arab, Dayak, dan Papua. Ciri khas identitas itulah yang disebut sebagai etnisitas. Perbincangan etnisitas berarti kita akan mengungkapkan suku, adat

istiadat yang terangkum dalam kebudayaan itu. Pada saat ini isu etnisitas diidentikkan dengan pandangan yang tidak enak didengar, misalnya etnisitas diidentikkan dengan penekanan etnis mayoritas terhadap etnis minoritas.

Secara etimologis, kata etnis (*ethnic*) berasal dari bahasa Yunani *ethnos*, yang pada perkembangannya merujuk pada pengertian suatu bangsa atau orang. Menurut Fredrik (Barth & Soesilo, 1988), definisi etnis yang ditujukan pada suatu kelompok tertentu di mana karena kesamaan ras, agama, asal usul bangsa ataupun kombinasi dari ketegori tersebut terikat pada sistem nilai budayanya (Hiplunudin, 2017). Sedangkan Barker (2005) menjelaskan etnis sebagai sebuah konsep budaya yang terpusat pada kesamaan norma, nilai, kepercayaan, simbol dan praktek budaya. Terbentuknya suku bangsa bersandar pada penanda budaya yang dimiliki secara bersama yang telah berkembang dalam konteks historis, sosial, dan politis tertentu yang mendorong rasa memiliki, yang paling tidak sebagian didasarkan pada nenek moyang mitologis yang sama (Hiplunudin, 2017).

Provinsi Maluku Utara merupakan wilayah yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku bangsa atau kelompok etnis. Keberagaman suku bangsa atau etnis ini di satu sisi membawa pengaruh positif untuk kekayaan kebudayaan, seni serta dinamika sosial kehidupan masyarakat. Namun disisi lain keberagaman etnis menjadi ancaman apabila tidak dikelola dengan baik. Sebab etnis yang ada dalam masyarakat akan bersaing untuk merebut posisi penting di arena politik, baik di legislatif maupun di eksekutif. Dengan adanya pertarungan ini akan terjadi dominasi etnis tertentu terhadap etnis yang lain. Dan dominasi ini akan

memunculkan sikap primordialisme dan etnosentrisme. Hal ini menjadi ancaman bilamana dalam masyarakat masih terdapat kelompok etnis dominan yang mengagung-agungkan sikap primordialisme dan etnosentrisme.

Menurut (Wangsanegara, 1986), primordialisme adalah rasa kesukuan yang berlebihan, yang diikuti dengan sikap, memegang teguh hal-hal yang dibawah sejak kecil, seperti adat istiadat, kepercayaan, dan segala sesuatu yang di lingkungan pertamanya. Sedangkan etnosentrisme adalah suatu kecenderungan yang menganggap nilai-nilai dan norma-norma kebudayaanya sendiri sebagai sesuatu yang prima, terbaik, mutlak, dan dipergunakan sebagai tolok ukur untuk menilai dan membedakan dengan kebudayaan lain (Hiplunudin, 2017).

Geertz misalnya menggunakan istilah etnisitas sebagai ikatan emosional (*emotional laden*) yakni perasaan yang sama terhadap kekhususan kelompok (*sense of belonging to a particular kind of group*) yaitu basis identitas yang mengikat subyek berdasarkan ikatan primordial (*primordial ties*) yang askriptif (lahiriah). Dalam kaitan ini, etnisitas dipandang sebagai bagian dari naluri kebertahanan biologis yang didasarkan pada nepotisme serta dimaksudkan guna melestarikan generasi etniknya. Karenanya, etnisitas ditandai simbol-simbol yang melekat kuat pada subyek sebagai basis identitasnya. Jadi, konsepsi teori Geertz pada kontestasi identitas etnik bahwa etnisitas bersumber dari identitas primordial yaitu simbol-simbol yang melekat kuat pada subyek dan terbentuk secara lahiriah, relatif sukar berubah (permanen) dan diwariskan secara turun temurun (La Suhu, 2019)

Pilkada Maluku Utara 2013 simbol etnik dapat terlihat pada konfigurasi

pemaketan pasangan calon, sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini :

Tabel 5
Instrumentalisasi Simbol Etnis pada
Konfigurasi Paslon

No	Nama Paslon	Etnis	Keterangan
1	Namto Hui Roba dan Ismail Arifin	Tionghoa dan Tidore	Namto Hui Roba beretnis Tionghoa dari agama Kresten Protestan dan Ismail Arifin beretnis Tidore dari agama Islam
2	Syamsir Andili dan Benny Laos	Makean dan Tionghoa	Syamsir Andili beretnis Makean dari agama Islam dan Benny Laos beretnis Tionghoa dari agama Kresten
3	Hein Namotemo dan Malik Ibrahim	Togale (Tobelo-Galela) dan Tidore	Hein Namotemo beretnis Tobelo-Galela dari agama Kresten Protestan dan Malik Ibrahim beretnis Tidore dari agama Islam
4	Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib	Tobelo-Galela dan Tidore	Agdul Gani Kasuba beretnis Tobelo-Galela dari agama Islam dan Muhammad Natsir Thaib beretnis Tidore dari agama Islam
5	Ahmad Hidayat Mus dan Hasan Doa	Buton dan Tidore	Ahmad Hidayat Mus beretnis Buton dari agama Islam dan Hasan Doa beretnis Tidore dari agama Islam
6	Muhadjir Albar dan Sahrin Hamid	Makean dan Togale (Tobelo-Galela)	Muhadjir Albar beretnis Makean dari agama Islam dan Sahrin Hamid beretnis Tobelo-Galela dari agama Islam

Sumber: diolah penulis

Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari 6 pasangan calon (paslon) tersebut terdapat 2 kandidat gubernur yang beretnis Tobelo-Galela dan sisanya beretnis Tionghoa, Tidore, Buton, dan Makean sementara 4 kandidat wakil gubernur yang beretnis Tidore dan sisanya beretnis Tionghoa dan Tobelo-Galela. Dilihat dari konfigurasi paslon etnis Tobelo-Galela lebih dominan pada

kandidat gubernur sedangkan etnis Tidore lebih dominan pada kandidat wakil gubernur. Hal ini disebabkan karena etnis Tobelo-Galela lebih dominan di Maluku Utara dengan prosentasi 20,48% sementara etnis Tidore 7,76%.

Praktek politik identitas etnis yang tergambar pada konfigurasi paslon bertujuan untuk mempengaruhi pilihan pemilih yang memiliki kesamaan etnis agar dapat memberikan dukungan suara pada hari pencoblosan. Terkait dengan kondisi masyarakat Maluku Utara yang multi etnis, LSI (Lembaga Survey Indonesia) menyebutkan bahwa latar belakang etnik kandidat sedikit banyak mempengaruhi pilihan pemilih. Ini terutama terjadi di wilayah-wilayah yang mempunyai perimbangan etnik, yang terdiri atas dua atau lebih suku yang dominan di wilayah tersebut (Sjaf, 2014).

Gambaran penggunaan simbol-simbol identitas etnik sangat melekat pada 6 paslon yang akan berkontestasi pada pilkada Maluku Utara 2013. Keenam (6) paslon rasanya sulit untuk melepaskan diri dari sosok yang menidentifikasikan dirinya sebagai perwakilan dari beberapa etnis yang ada. Dengan masyarakat yang multi etnis akan terbuka luas peluang bagi 6 paslon untuk meraih kemenangan dalam pilkada. Dan kemenangan tersebut bisa diraih apabila penggunaan strategi sesuai dengan kebutuhan pasar atau pemilih.

Penggunaan identitas etnis oleh paslon dalam Pilkada 2013 menjadi pertimbangan karena komposisi etnis yang ada di Maluku Utara, ada terdapat 7 kelompok etnis dominan menurut jumlah, kualitas, dan keterwakilan mereka di lembaga pemerintahan daerah. Etnis-etnis yang dimaksud adalah: pertama, Tobelo (10,78%) yang dominan di Halmahera Utara dan tersebar di Halmahera Selatan, Halmahera Timur, dan Halmahera

Tengah; kedua, etnis Galela (9,70%) dominan di Pulau Morotai tersebar juga di Halmahera Selatan, dan Halmahera Utara; ketiga, etnis Ternate (9,40%) dominan di Kota Ternate dan tersebar di Halmahera Barat; keempat, etnis Makean (8,51%) dominan Pulau Makean dan tersebar di Halmahera Selatan, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dan Kota Ternate; kelima, etnis Tidore (7,76%) dominan Pulau Tidore dan tersebar di Halmahera Tengah, dan Kota Ternate; keenam, etnis Sula (6,98%) dominan di Kepulauan Sanana dan tersebar di Kota Ternate; ketujuh, etnis Buton (5,67%) dominan di pulau Taliabu dan pulau Obi. Dari 7 etnis tersebut, ada 5 etnis yang menjadi langganan pada momen pilkada, diantaranya; etnis Tobelo, Galela, Tidore, Makean, dan Ternate.

Sesungguhnya para tokoh yang bertarung meyakini bahwa basis massa yang dimilikinya akan memberikan dukungan dalam pilkada. Sebab modal sosial yang dibangun dalam masyarakat sudah cukup lama sehingga akan berdampak pada hasil yang diharapkan. Namun hal tersebut tidak berbanding lurus dengan yang diprediksikan. Berdasarkan pengalaman yang telah terjadi, maka seorang tokoh akan melakukan pilihan strategi yang sesuai berupa penggunaan etnis, jaringan ketokohan, dan program kerja.

Berkaitan dengan hal tersebut pasangan AGK-Manthab yang memenangkan Pilkada 2013 dapat menggunakan simbol-simbol identitas ini, sebab AGK berlatar belakang etnis Tobelo-Galela yang dominan di Maluku Utara serta memiliki rekam jejak ketokohan yang baik akan diuntungkan apabila memanfaatkan simbol identitas etnis sebagai strategi pemasarannya. Hal tersebut dapat ditemukan dalam

wawancara peneliti dengan informan. Simbol identitas sangat menguat dan terasa, ketika AGK melakukan kampanye di Kabupaten yang didiami sebagian besar etnis Togale (Tobelo Galela) diantaranya Halmahera Selatan, Halmahera Utara, dan Pulau Morotai. Simbol identitas yang tampak adalah penggunaan bahasa daerah (Tobelo) pada saat kampanye, dan sangat menyentuh bagi basis pemilih. Mereka merasa bangga karena ada keluarga, saudara, anak, dan cucunya berdiri di hadapan masa kampanye untuk bertarung merebut gubernur Maluku Utara. Maka kebanggaan itu diaplikasikan dalam bentuk dukungan suara pada AGK-Manthab dalam meraih kemenangan. Sementara untuk daerah yang bukan basis etnis Togale (Tobelo-Galela) AGK-Manthab berkampanye menggunakan jaringan ketokohan, mesin politik partai dan menyampaikan visi misi serta program kerjanya dengan strategi *direct selling* atau berhadapan langsung dengan masyarakat pemilih. Misalnya saat kampanye di daerah yang bukan basis etnis Togale, AGK-Manthab menggunakan tokoh lokal yang berpengaruh di daerah tersebut dan menurunkan tim *direct selling* untuk memasarkan dirinya, visi misi dan program kerja. Dan hal yang sama juga dilakukan oleh Muhammad Natsir Thaib di daerah basis etnis Tidore, diantaranya Tidore Kepulauan dan Kota Ternate.

Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang menyebabkan kemenangan AGK-Manthab di Pilkada Maluku Utara 2013 adalah: 1) Ketokohan. Faktor ketokohan Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai penceramah yang telah dijalaninya selama 30 tahun di Jazirah Maluku Utara membuatnya sangat dikenal dan populer, hal ini dibuktikan dengan hasil

survey LSI dan lembaga Katalis menjelang Pilgub 2013, bahwa AGK memiliki popularitas dan elektabilitas yang sangat tinggi dibandingkan dengan kandidat lain. Faktor ketokohan ini kemudian menyebabkan pencalonan AGK sebagai gubernur mendapat dukungan yang cukup besar dari pemilih dan dapat memenangkan Pilkada Provinsi Maluku Utara 2013. 2) Etnisitas. AGK memiliki basis massa etnis Tobelo-Galela yang kuat di daerah asalnya, yaitu Halmahera Utara dan Halmahera Selatan serta tersebar di Kabupaten Pulau Morotai, Halteng, dan Halitim. Hal ini juga diperkuat dengan posisi adik dari AGK, Muhammad Kasuba sebagai bupati Halmahera Selatan dan calon wakil gubernur Muhammad Natsir Thaib sebagai etnis Tidore. 3) Jaringan. AGK-Manthab sebagai tokoh agama dan memiliki basis etnis dominan, tentunya jaringan ketokohan dan etnis telah terbentuk lama sehingga dukungan dari beberapa tokoh yang kalah pada putaran pertama menjadi bukti adanya jaringan tersebut. Dan tokoh-tokoh yang mendukung ini memperoleh suara signifikan di daerah asalnya yaitu Syamsir Andili-Benny Laos yang menang di Kota Ternate, Hein Namotemo-Malik Ibrahim yang menang di Halmahera Utara, dan Muhajir Albar dan Sahrin Hamid memperoleh suara merata diseluruh Kabupaten/Kota. Para paslon tersebut juga membentuk tim relawan diseluruh Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk menghimpun berbagai tokoh yang ada di Maluku Utara, misalnya tokoh akademisi, aktivis mahasiswa, aktivis paguyuban, LSM, pers dan jaringan majelis ta'lim.

Bibliografi

- Arifin, A. (2003). *Komunikasi politik: paradigma, teori, aplikasi, strategi komunikasi politik Indonesia* (Issue 5793). Balai Pustaka.
- Barth, F., & Soesilo, N. I. (1988). *Kelopok etnik dan batasannya: tatanan sosial dari perbedaan kebudayaan*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Dendy, S. (2008). Kamus besar bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia.
- Hiplunudin, A. (2017). *Politik identitas di Indonesia: dari zaman kolonialis Belanda hingga reformasi*. Calpulis.
- La Suhu, A. F. B. B. (2019). Politik Identitas Di Pilkada Maluku Utara 2013. *Ejournal KAWASA*, 9(2), 33–53.
- Maarif, A. S., Maarif, A. S., Ali-Fauzi, I., & Panggabean, S. R. (2010). *Politik identitas dan masa depan pluralisme kita*. Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Wakaf Paramadina.
- Marijan, K. (2007). Pilkada Langsung: Resiko Politik, Biaya Ekonomi, Akuntabilitas Politik dan Demokrasi Lokal. *In-House Discussion Komunikasi Dialog Partai Politik” Organized by Komunitas Indonesia Untuk Demokrasi*.
- Mun'im A, S. (2003). *Membendung militansi agama: iman dan politik dalam masyarakat modern*. Penerbit Erlangga.
- Nurfitriani, N., Hamrun, H., & Taufik, A. (2017). Pemasaran Politik Bupati Bima Terpilih pada Pilkada Kabupaten Bima Tahun 2015. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 5(2), 71–78.
- Salim, K. (2016). Politik Identitas di Maluku Utara. *POLITIK*, 11(2).
- Sjaf, S. (2014). *Politik Etnik: Dinamika Lokal di Kendari*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sutrisno, C. (2017). Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada. *JPK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 2(2), 36–48.
- Wahyudi, H., Fernando, T., Ahmad, A., Khairani, A., Fatimah, F., Agung, I. M.,

- & Milla, M. N. (2013). Peran kepercayaan politik dan kepuasan demokrasi terhadap partisipasi politik mahasiswa. *Jurnal Psikologi*, 9(2), 94–99.
- Wangsanegara, S. (1986). Ilmu Sosial Dasar. *Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Jakarta.*
- Yustian, Y. (2008). Strategi Kampanye Politik Calon Incumbent dan Pendaftar Baru dalam Pemilihan Kepala Daerah Baru dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus: Tim Kampanye Pasangan Danny Setiawan-Iwan Sulanjana dan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf Di Kota Bogor, Jawa Barat). *Skripsi Program Studi Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Pertanian. Bogor: Institut Pertanian Bogor.*

Copyright holder :

Aswir F. Badjodah dan Saiful Ahmad (2021).

First publication right :

Jurnal Syntax Transformation

This article is licensed under:

